

KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN PENDUDUK LOKAL PADA JASA EKOWISATA DI TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU

IWAN NUGROHO¹⁾, PURNAWAN D. NEGARA²⁾, DAN Y. AGUNG NUGROHO¹⁾

¹⁾ Fakultas Pertanian, Universitas Widyagama, Malang
Email: iwanuwg@yahoo.com

²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Widyagama, Malang

ABSTRACT

This study aims to test entrepreneurial spirit and to analyze relationship between entrepreneurship components on ecotourism activities of the local people in the Bromo Tengger Semeru National Park (BTS NP). Survey was conducted in three villages: (i) Ranu Pane, Senduro district, Lumajang regency, (ii) Ngadas, Poncokusumo district, Malang Regency), and (iii) Ngadisari, Sukapura district, Probolinggo Regency. Analysis methods were entrepreneur test adopted from CRE (2003) and Structural Equation Modelling (SEM) approach.

The research found that the score of entrepreneur test was 35.84 categorized as somewhat entrepreneurial. Community support test was 14.61 categorized as mixed support. Meanwhile, the score of government support tests in Ngadisari, Ranupane and Ngadas were 17.34, 15.31 and 14.36 respectively. The study showed that community in Ngadisari perceived a significantly entrepreneurial support from government. In the Ranupane dan Ngadas, such government support was categorized as mixed support.

Direct effect of government entrepreneurship to individual entrepreneurship was not significant. This relationship was rather indirect effect using social entrepreneurship as an intermediate component. This research proved that social entrepreneurship development is necessary condition for government to develop individual entrepreneurship in ecotourism activities.

Key words: ecotourism, entrepreneurial test, social entrepreneurship, national park, Bromo Tengger Semeru

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk: (a) mengukur uji kewirausahaan, dan; (b) menelaah hubungan antara komponen kewirausahaan penduduk lokal pada jasa ekowisata di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS). Survei dilakukan pada masyarakat di tiga desa: (a) Ranu Pane, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, (b) Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dan (c) Ngadisari atau Cemorolawang, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Metode analisis menggunakan uji kewirausahaan CRE (2003) dan pendekatan Structural Equation Modelling (SEM).

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata skor uji kewirausahaan individu sebesar 35.84, tergolong sebagai berjiwa entrepreneur. Rata-rata skor uji kewirausahaan sosial sebesar 14.61 atau tergolong setengah mendukung berkembangnya kewirausahaan. Adapun rata-rata skor uji kewirausahaan pemerintah di desa Cemorolawang, Ranupane dan Ngadas adalah 17.34, 15.31, dan 14.36. Responden Cemorolawang mempersepsikan pemerintah mendukung berkembangnya kewirausahaan. Sementara responden di desa Ranupane dan Ngadas, mempersepsikan pemerintah setengah mendukung berkembangnya kewirausahaan. Pengaruh langsung kewirausahaan pemerintah terhadap kewirausahaan individu adalah tidak signifikan. Hubungan tersebut lebih bersifat tidak langsung, yakni melalui kewirausahaan sosial. Penelitian ini mampu membuktikan bahwa pengembangan kewirausahaan sosial adalah syarat perlu bagi pemerintah untuk mengembangkan kewirausahaan individu jasa ekowisata.

Kata kunci: ekowisata, uji kewirausahaan, kewirausahaan sosial, taman nasional, Bromo Tengger Semeru

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ekowisata merupakan salah satu pintu masuk atau sektor riil yang relevan dalam upaya konservasi lingkungan dan budaya lokal. Upaya pengembangan ekowisata dengan melibatkan penduduk lokal adalah hal yang kritical. Kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*) merupakan kata kunci agar mereka mampu mengoperasikan jasa ekowisata dan menikmati

kesejahteraan. Proses pembelajaran sangat penting agar penduduk lokal memahami kewirausahaan ekowisata (Juma and Timmer, 2003). Dengan demikian, usaha ekowisata dapat dimaknai serupa seperti halnya usaha tani yang dapat memberi pekerjaan dan penghidupan, serta menghasilkan pendapatan dan kesejahteraan.

Secara umum, karakteristik kewirausahaan ditentukan oleh faktor-faktor individu, masyarakat, dan pemerintah (Juma and Timmer, 2003; CRE, 2003; Burnet, 2000). Cerita sukses berwirausaha pada jasa ekowisata, seperti

di Tangkahan atau Bali, menuntut partisipasi yang tinggi dari seluruh faktor atau *stakeholder* untuk merealisasikan kesejahteraan penduduk lokal. Sementara kewirausahaan jasa ekowisata oleh di TN BTS secara umum belum berkembang (Nugroho dan Negara, 2008). Pengalaman empirik tersebut perlu ditelaah lebih mendalam agar dapat diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dan diaplikasikan ke tujuan ekowisata lainnya.

Studi spesifik tentang pengembangan kewirausahaan penduduk lokal pada jasa ekowisata di Indonesia sedemikian jauh bersifat deskriptif. Karakteristik kewirausahaan ekowisata perlu dianalisis lebih kuantitatif dan komprehensif sehingga menghasilkan model bagi pengembangan kewirausahaan penduduk lokal dalam ekowisata. Karakteristik kewirausahaan dapat diukur melalui uji kewirausahaan individu (*entrepreneurship test*), kewirausahaan sosial (*community support test*) dan kewirausahaan pemerintah (*government support test*) (CRE, 2003)

Tujuan

Penelitian bertujuan untuk: (i) mengukur uji kewirausahaan, dan: (ii) menelaah faktor-faktor serta bentuk hubungannya dalam mempengaruhi karakteristik kewirausahaan penduduk lokal pada jasa ekowisata di wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS)

METODE PENELITIAN

Survei dilaksanakan di tiga desa dalam wilayah TN BTS, yakni: (i) Ranu Pane, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, (ii) Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dan (iii) Ngadisari atau Cemorolawang, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Di wilayah tersebut masyarakat telah mengenal jasa usaha ekowisata. Responden adalah masyarakat dari masing-masing desa yang dipilih secara *purposive*. Responden terpilih berjumlah 159 orang, yang terdistribusi 71,58, dan 30 orang dari masing-masing desa. Data digali melalui kuesioner untuk memperoleh informasi karakteristik individu dan kewirausahaan.

Metode analisis menggunakan uji kewirausahaan CRE (2003) untuk menghitung skor kewirausahaan individu, sosial, dan pemerintah. Hubungan antar komponen kewirausahaan menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Struktur model terdiri komponen karakteristik individu, pengalaman, pendapatan, kewirausahaan individu, kewirausahaan sosial, dan kewirausahaan pemerintah. Landasan model menggunakan konsepsi kewirausahaan (Juma and Timmer, 2003; CRE, 2003; Burnet, 2000). Hasil analisis diuji validitas dan realibilitas agar supaya diperoleh ketepatan hubungan antar variabel (Solimun, 2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kewirausahaan

Tabel 1 memperlihatkan bahwa skor uji kewirausahaan individu, sosial, dan pemerintah. Secara keseluruhan rata-rata uji kewirausahaan individu adalah 35,84. Kewirausahaan individu tertinggi ditemukan di desa Cemorolawang (=38,21), diikuti Ranupane (=36,00), dan Ngadas (=34,45). Menurut CRE (2003), responden di tiga desa tersebut tergolong berjiwa entrepreneur (dalam kisaran 30 hingga 39).

Sementara itu, rata-rata skor uji kewirausahaan sosial sebesar 14,61. Kewirausahaan sosial tertinggi ditemukan di desa Ranupane (=15,56), diikuti Ngadas (=13,90) dan Cemorolawang (=13,69). Menurut CRE (2003), responden di tiga desa tergolong setengah mendukung berkembangnya kewirausahaan (dalam kisaran 11 hingga kurang dari 16).

Tabel 1. Nilai skor uji kewirausahaan individu, sosial dan pemerintah

Wilayah	Kewirausahaan Individu	Kewirausahaan Sosial	Kewirausahaan Pemerintah
Cemorolawang	38,21	13,69	17,34
Ngadas	34,45	13,90	14,36
Ranupane	36,00	15,56	15,31
Total Wilayah	35,84	14,61	15,33

Catatan:

Keterangan skor:

Uji kewirausahaan individu: skor: 0 hingga 9 =tidak berjiwa entrepreneur; 10 hingga 19 =sedikit berjiwa entrepreneur; 20 hingga 29=sebagian berjiwa entrepreneur; 30 hingga 39=berjiwa entrepreneur; 40 hingga 50=sangat berjiwa entrepreneur

Uji kewirausahaan sosial atau pemerintah: skor: 0 hingga 5 =tidak mendukung; 6 hingga 10 =netral; 11 hingga 15 =setengah mendukung; 16 hingga 20=mendukung; 21 hingga 25=sangat mendukung

Rata-rata skor uji kewirausahaan pemerintah di tiga desa adalah 15,33. Kewirausahaan pemerintah tertinggi ditemukan di desa Cemorolawang (=17,34), diikuti Ranupane (=15,31) dan Ngadas (=14,36). Menurut CRE (2003), responden di desa Cemorolawang mempersepsikan pemerintah mendukung berkembangnya kewirausahaan (kisaran 16 hingga kurang dari 21), sementara di desa Ranupane dan Ngadas, responden mempersepsikan pemerintah setengah mendukung berkembangnya kewirausahaan (kisaran 11 hingga kurang dari 16)

Studi uji kewirausahaan sejenis di Amerika Serikat untuk kewirausahaan individu dan sosial masing-masing sebesar 37,9 dan 12,7 (CRE, 2003). Angka tersebut masuk dalam kisaran skor penelitian ini, sekalipun menggunakan responden tokoh atau masyarakat yang relatif berpendidikan.

Secara umum hasil uji kewirausahaan individu sejalan dengan keadaan lapangan. Penduduk desa Cemorolawang telah memiliki ketrampilan dan manajemen jasa usaha ekowisata yang relatif baik dibanding Ranupane dan Ngadas (Nugroho, 2006; Nugroho dan Negara, 2008). Di Cemorolawang ditemui banyak *homestay*, rumah (warung) makan, moda transportasi (*offroad*, kuda), dan akomodasi lainnya yang dikelola penduduk lokal. Di Ranupane ditemukan sebuah *homestay*, yakni Tasrip

Homestay, yang dikelola oleh keluarga Kepala Desa. Sementara di Ngadas, belum ada *homestay* formal.

Kemampuan kewirausahaan individu penduduk Cemorolawang tidak berdiri sendiri. Dalam menjalankan aktivitas jasa ekowisata telah didirikan koperasi untuk mengorganisasi dan mendukung aktivitas ekonomi. Untuk menggunakan jasa layanan transportasi *offroad*, prosedur pembayaran dilakukan di bank. Slip pembayaran kemudian diserahkan kepada petugas untuk mempersiapkan pemberangkatan mobil. Dengan demikian, pengunjung maupun *driver* dalam posisi yang nyaman untuk menjalankan tugasnya masing-masing.

Upaya pelembagaan aktivitas ekonomi ini diinisiasi dan didukung sepenuhnya oleh kepala desa. Kepala Desa Cemorolawang memiliki cara berpikir maju, moderat dan berhasrat memajukan ekonomi, dan memberdayakan penduduk lokal. Kepala Desa adalah penduduk asli, berpendidikan magister manajemen. Kepala Desa sangat terbuka terhadap gagasan untuk mengembangkan ekowisata dalam kerangka konservasi lingkungan dan budaya Tengger. Keberadaan kelembagaan, prosedur aktifitas ekonomi dan partisipasi masyarakat dapat menjelaskan tingginya skor kewirausahaan pemerintah. Kepala desa telah berfungsi menyusun keseimbangan baru yang memberikan manfaat kesejahteraan bagi penduduk lokal (Martin dan Osberg, 2007)

Skor kewirausahaan sosial di Ranupane lebih tinggi dari yang lain, sekalipun sama-sama masuk kategori setengah mendukung berkembangnya kewirausahaan (dalam kisaran 11 hingga kurang dari 16). Berdasarkan pengamatan (disertai konsultasi dengan Purnawan D Negara) dan studi sebelumnya (Nugroho, 2006; Nugroho dan Negara, 2008), karakter sosial penduduk Ranupane antara lain lebih majemuk, lebih banyak pendatang dibanding penduduk Tengger, dan lebih terbuka terhadap perubahan. Infrastruktur jalan raya, listrik dan telekomunikasi sangat memadai, khususnya akses dari Kabupaten Lumajang. Di Ranupane, bertugas staf TN BTS sebagai pintu masuk pendakian ke puncak Semeru, di mana setiap saat dan sepanjang tahun pendaki berdatangan. Deskripsi demikian dapat menjelaskan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, khususnya dengan penduduk luar. Hal inilah yang mengakibatkan tingginya kewirausahaan sosial di Ranupane.

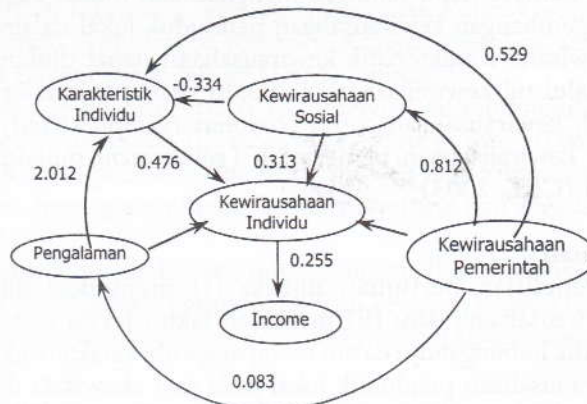
Struktur Kewirausahaan

Hasil analisis model struktural kewirausahaan disajikan dalam Gambar 1. Konsep yang melandasi model memperlihatkan bahwa kewirausahaan pemerintah mempengaruhi komponen kewirausahaan sosial dan individu, serta pengalaman dan karakteristik individu. Secara bersamaan kewirausahaan individu menjadi pusat perhatian, dipengaruhi oleh kewirausahaan sosial, karakteristik individu, dan pengalaman. Model ini menyatakan kewirausahaan individu berbanding lurus dengan pendapatan dalam jasa ekowisata. Secara keseluruhan, disain model memenuhi kelayakan statistik dan reliabilitas.

Hubungan Antar Komponen Kewirausahaan

Hasil analisis menghasilkan koefisien regresi yang mengoperasikan hubungan antar variabel (Gambar 1 dan Tabel 2). Secara keseluruhan, pengaruh langsung yang signifikan meliputi hubungan:

- Kewirausahaan Pemerintah - Kewirausahaan Sosial
- Kewirausahaan Pemerintah - Karakteristik Individu
- Kewirausahaan Sosial - Kewirausahaan Individu
- Pengalaman - Karakteristik Individu
- Karakteristik Individu - Kewirausahaan Individu
- Kewirausahaan Individu - Income
- Kewirausahaan Sosial - Karakteristik Individu



Gambar 1. Struktur kewirausahaan

Tabel 2. Hubungan antar komponen kewirausahaan

Uraian	Kewirausahaan Pemerintah	Kewirausahaan Sosial	Pengalaman	Karakteristik Individu	Kewirausahaan Individu
Pengaruh langsung					
Kewirausahaan Sosial	0,812	0,000	0,000	0,000	0,000
Pengalaman	0,083	0,000	0,000	0,000	0,000
Karakteristik Individu	0,529	-0,334	2,012	0,000	0,000
Kewirausahaan Individu	0,105	0,313	-0,069	0,476	0,000
Pendapatan	0,000	0,000	0,000	0,000	0,255
Pengaruh tidak langsung					
Kewirausahaan Sosial	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pengalaman	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Karakteristik Individu	-0,105	0,000	0,000	0,000	0,000
Kewirausahaan Individu	0,450	-0,159	0,957	0,000	0,000
Pendapatan	0,142	0,039	0,227	0,121	0,000
Pengaruh total					
Kewirausahaan Sosial	0,812	0,000	0,000	0,000	0,000
Pengalaman	0,083	0,000	0,000	0,000	0,000
Karakteristik Individu	0,424	-0,334	2,012	0,000	0,000
Kewirausahaan Individu	0,556	0,154	0,888	0,476	0,000
Pendapatan	0,142	0,039	0,227	0,121	0,255

Koefisien regresi di atas (nilai absolut) 0,3 adalah signifikan (Solimun, 2004)

Hubungan langsung berbanding lurus (koefisien regresi positif) pada dasarnya telah sesuai dengan konsep-konsep kewirausahaan. Namun demikian, ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, kewirausahaan pemerintah tidak signifikan mempengaruhi kewirausahaan individu. Hal ini perlu ditelaah lagi dalam pengaruh tidak langsung, dengan implikasi pemerintah tidak dapat intervensi langsung dalam pengembangan kewirausahaan individu.

Kedua, yang perlu dicermati adalah hubungan negatif antara kewirausahaan sosial dan karakteristik individu. Telaah pustaka sebelumnya (Mair and Marty, 2006; Martin dan Osberg, 2007) menyatakan kewirausahaan sosial dipicu dan digerakkan oleh inovasi individu untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi. Penjelasan ini sesungguhnya menunjukkan hubungan negatif atau bahkan tidak ada hubungan antar kedua variabel. Hal ini semakin jelas karena karakteristik individu yang terdiri *observed variables* jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan, dan tidak memuat unsur pembelajaran sebagai komponen kewirausahaan (Juma and Timmer, 2003).

Sementara itu pengaruh tidak langsung yang signifikan ditemukan pada hubungan: (i) kewirausahaan pemerintah terhadap kewirausahaan individu, dan; (ii) pengalaman terhadap kewirausahaan individu. Hubungan tidak langsung menggunakan media variabel antara (*intermediate variable*) yang menjadi jembatan untuk menjelaskan fenomena yang sesungguhnya, yakni:

- Kewirausahaan Pemerintah - **Kewirausahaan Sosial** - Kewirausahaan Individu
- Kewirausahaan Pemerintah - **Karakteristik Individu** - Kewirausahaan Individu
- Kewirausahaan Pemerintah - **Pengalaman** - Kewirausahaan Individu
- Pengalaman - **Karakteristik Individu** - Kewirausahaan Individu

Pengaruh kewirausahaan pemerintah terhadap kewirausahaan individu dapat dijembatani variabel antara kewirausahaan sosial, karakteristik individu dan pengalaman, masing-masing dengan kumulatif koefisien regresi 1,125, 1,005 dan 0,014. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial menjadi jembatan paling kuat bagi pengaruh kewirausahaan pemerintah terhadap kewirausahaan individu, di mana dalam hubungan pengaruh langsung tidak signifikan. Dengan demikian, penelitian ini mampu membuktikan bahwa pengembangan kewirausahaan sosial adalah syarat perlu bagi pemerintah untuk mengembangkan kewirausahaan individu jasa ekowisata. Lebih penting dari itu, kewirausahaan pemerintah menjadi modal awal mengawalinya untuk membangun trust kepada masyarakat dan pelaku ekonomi ekowisata.

Pengaruh variabel antara karakteristik individu dalam hubungan kewirausahaan pemerintah terhadap kewirausahaan individu, maupun pengalaman terhadap kewirausahaan individu; memperlihatkan besaran signifikan. Implementasi spesifik hubungan ini, sesuai dengan variabel yang diamati, pemerintah berperan dalam pembangunan pendidikan sebagai media untuk mengembangkan kewirausahaan individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan memperbaiki cara berpikir dan pengetahuan, sehingga terjadi pembelajaran berwirausaha.

Penentu Komponen Kewirausahaan

Hasil analisis model struktural juga menghasilkan koefisien regresi antara peubah yang diamati (*observed variable*) dan komponen kewirausahaan (*unobserved variable*). Hubungan ini akan menjelaskan variabel mana yang dapat menentukan kewirausahaan (Tabel 3).

Tabel 3. Pengaruh peubah yang diamati terhadap komponen kewirausahaan

Komponen	Peubah yang Diamati	Koefisien Regresi
Kewirausahaan Individu	x31 Senang berbuat sesuatu yang baru	0,482
	x32 Senang menghadapi tantangan	0,518
	x33 Mau berkorban demi keberhasilan	0,605
	x34 Bebas berekspresi tidak menggantungkan orang lain	0,561
	x35 Dinamis melihat peluang	0,696
	x36 Ingin lebih maju dan berkembang	0,544
	x37 Memiliki ketrampilan untuk berbisnis	0,752
	x38 Memiliki teman-teman bisnis	0,893
	x39 Punya calon teman bisnis	0,853
	x310 Berbisnis dengan orang lain	0,824
Kewirausahaan Sosial	x41 Masyarakat mengerti arti kewirausahaan untuk pembangunan	1,018
	x42 Masyarakat mendukung berkembangnya pebisnis/usaha baru	0,788
	x43 Masyarakat membantu pebisnis yang gagal dan mencoba bangkit kembali	0,661
	x44 Masyarakat memiliki program membantu lahirnya pebisnis baru	0,572
	x45 Masyarakat mendukung lahirnya pebisnis muda lulusan sekolah/Universitas	0,522
Kewirausahaan Pemerintah	x51 Pemerintah memiliki program pengembangan kewirausahaan	0,931
	x52 Pemerintah melakukan penyuluhan untuk pengembangan kewirausahaan	0,996
	x53 Pemerintah memberikan bantuan teknis/modal kepada pebisnis	0,840
	x54 Pemerintah membantu promosi untuk pengembangan usaha	0,647

Dari sepuluh variabel yang mempengaruhi komponen kewirausahaan individu, ditemukan kecenderungan kenaikan koefisien regresi dari X31 menuju X310, atau dari aspek kognitif menuju psikomotorik. Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan individu lebih dipengaruhi atau ditentukan oleh aspek psikomotorik. Hal ini pada dasarnya sejalan dengan konsep kewirausahaan. Dengan kata lain, konsep kewirausahaan individu sudah mampu dipahami dengan baik dalam konteks jasa ekowisata. Tiga variabel tertinggi yang berpengaruh terhadap kewirausahaan individu adalah memiliki jaringan bisnis (0,893), siap berbisnis (0,853), sudah berbisnis dengan orang lain (0,824).

Dua variabel tertinggi yang berpengaruh terhadap kewirausahaan sosial adalah masyarakat mengerti arti kewirausahaan untuk pembangunan (1,018) dan mendukung berkembangnya pebisnis/usaha baru (0,788). Dalam arah X41 menuju X45, atau dari aspek kognitif menuju psikomotorik, terjadi kecenderungan penurunan koefisien regresi. Hal ini memperlihatkan bahwa kewirausahaan sosial lebih dipengaruhi atau ditentukan oleh aspek kognitif. Hal ini bermakna bahwa kewirausahaan sosial belum dipahami secara

menyeluruh, atau belum sampai membangun aspek perilaku berwirausaha.

Temuan pada aspek kewirausahaan pemerintah menunjukkan arah yang hampir sama dengan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan pemerintah lebih dipengaruhi oleh aspek-aspek kognitif, dengan menghasilkan dua variable dengan koefisien tertinggi yakni pemerintah memiliki program pengembangan kewirausahaan (0,931) dan pemerintah melakukan penyuluhan untuk pengembangan kewirausahaan (0,996). Hal ini bermakna bahwa kewirausahaan pemerintah belum sepenuhnya dipahami hingga aspek perilaku berwirausaha. Dua temuan terakhir perihal kewirausahaan sosial dan pemerintah tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep kewirausahaan. Hal ini agaknya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut khususnya dalam jasa ekowisata. Upaya menelaah kewirausahaan sosial dan pemerintah nampaknya tidak cukup hanya menggali dari masyarakat. Studi ini juga perlu menggali dari komponen pemerintah, misalnya petugas taman nasional atau instansi terkait.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penelitian menghasilkan rata-rata skor uji kewirausahaan individu sebesar 35,84. Kewirausahaan individu tertinggi ditemukan di desa Cemorolawang (=38,21), diikuti Ranupane (=36,00) dan Ngadas (=34,45). Skor tersebut tergolong berjiwa entrepreneur.
2. Rata-rata skor uji kewirausahaan sosial sebesar 14,61. Kewirausahaan sosial tertinggi ditemukan di desa Ranupane (=15,56), diikuti Ngadas (=13,90) dan Cemorolawang (=13,69). Skor tersebut tergolong setengah mendukung berkembangnya kewirausahaan.
3. Rata-rata skor uji kewirausahaan pemerintah adalah 15,33. Kewirausahaan pemerintah tertinggi ditemukan di desa Cemorolawang (=17,34), diikuti Ranupane (=15,31) dan Ngadas (=14,36). Skor di desa Cemorolawang mempersepsikan pemerintah mendukung berkembangnya kewirausahaan. Sementara skor di desa Ranupane dan Ngadas, mempersepsikan pemerintah setengah mendukung berkembangnya kewirausahaan.
4. Pengaruh langsung kewirausahaan pemerintah terhadap kewirausahaan individu adalah tidak

signifikan. Hubungan tersebut lebih bersifat tidak langsung, yakni melalui kewirausahaan sosial. Penelitian ini mampu membuktikan bahwa pengembangan kewirausahaan sosial adalah syarat perlu bagi pemerintah untuk mengembangkan kewirausahaan individu jasa ekowisata.

5. Kewirausahaan individu lebih dipengaruhi oleh aspek psikomotorik. Hal ini bermakna konsep kewirausahaan individu sudah mampu dipahami dengan baik dalam konteks jasa ekowisata. Sementara itu, kewirausahaan sosial, dan pemerintah lebih dipengaruhi oleh aspek kognitif. Hal ini bermakna bahwa kewirausahaan sosial dan pemerintah belum dipahami secara menyeluruh, atau belum sampai membangun aspek perilaku berwirausaha.

Saran

Kewirausahaan sosial dan pemerintah belum sepenuhnya dipahami ke dalam aspek perilaku berwirausaha. Temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep kewirausahaan. Upaya menelaah kewirausahaan sosial dan pemerintah nampaknya tidak cukup menggali hanya dari masyarakat. Studi ini juga perlu menggali dari komponen pemerintah, misalnya petugas taman nasional atau instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Burnett, D. 2000. Hunting for Heffalumps: The Supply of Entrepreneurship and Economic Development. Founder, Technopreneurial.com. September 2000
- CRE (Centre for Rural EntrepreneurshiP). 2003. Entrepreneurship quick test: tools for energizing entrepreneurship. No 4 (June 2003). 10p.
- Juma, C. and V. Timmer. 2003. "Social Learning and Entrepreneurship: A Framework for Analyzing the Equator Initiative and the 2002 Equator Prize Finalists." Working paper of 5 December
- Mair, J. and I. Marty. 2006. Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. *Journal of World Business*. 41: 36-44
- Martin, R. L. and S. Osberg. 2007. Social entrepreneurship: the case for definition. *Stanford Social Innovation Review*. Spring 2007. 39p
- Nugroho, I. 2006. Mengangkat Ekowisata Ngadas di Kawasan Bromo Tengger Semeru. TEROPONG, Balitbang Provinsi Jatim. 28 (Juni-Agustus 2006):21-23.
- Nugroho, I. dan P. D. Negara. 2008. Produk dan Jasa Ekowisata di Jawa Timur. TEROPONG, Balitbang Provinsi Jatim. 38 (Maret April 2008):26-29. ISSN 1412-8829
- Solimun. 2004. Structural Equation Modeling (SEM) Aplikasi Software AMOS, Fakultas MIPA dan Program Pasca Sarjana. Universitas Brawijaya, Malang.